

SOLUSI ISLAM DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN: STUDI KASUS DI INDONESIA

¹Naura Syifa Hamida, ²Syifani Ikrimahtul Lestari

¹²Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta, Indonesia

¹nausyifa019@gmail.com, ²syifaniikrimah@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat Indonesia mencerminkan kegagalan sistem ekonomi kapitalisme dalam mendistribusikan kekayaan yang adil. Penelitian ini bertujuan mengkaji relevansi dan implementasi solusi Islam dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk studi pustaka dan studi kasus di Indonesia. Informasi dikumpulkan dari artikel-artikel yang sudah publis, buku-buku ekonomi, media massa, dan sumber utama buku Sistem Ekonomi Islam karya Taqiyuddin an-Nabhani serta dokumen-dokumen terkait kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan bantuan sosial, tetapi memerlukan perubahan sistemik pada struktur ekonomi dan distribusi kepemilikan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Kemiskinan, Distribusi Kekayaan

Abstract

The poverty that afflicts most of Indonesians reflects the failure of the capitalist economic system in distributing wealth fairly. This research aims to examine the relevance and implementation of Islamic solutions in overcoming poverty in Indonesia. The research uses qualitative methods for literature studies and case studies in Indonesia. Information was collected from published articles, economics books, mass media, and the main source of the book *The Islamic Economic System* by Taqiyuddin an-Nabhani as well as documents related to poverty alleviation policies in Indonesia. The results show that poverty cannot be overcome through social assistance approaches alone, but requires systemic changes to the economic structure and distribution of ownership.

Keywords: Islamic Economy, Poverty, Wealth Distribution

PENDAHULUAN

Kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat Indonesia mencerminkan kegagalan sistem kapitalis menciptakan distribusi kekayaan yang adil. Meskipun berbagai program bantuan sosial telah diluncurkan, kenyataannya ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata. Kondisi ini mencerminkan adanya permasalahan mendasar dalam sistem ekonomi yang diterapkan (Hamid, 2009; Laster Pirtle, 2020; Loewen, 2022; Malkawi, 2020; Spash, 2022). Sistem ekonomi kapitalisme telah mendominasi kebijakan ekonomi nasional dinilai gagal dalam menciptakan distribusi kekayaan yang adil. Dalam sistem ini, kepemilikan dan penguasaan atas sumber daya ekonomi cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga memperbesar kesenjangan sosial. Ketimpangan ini mendorong perlunya kajian terhadap alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat.

Adapun Islam sebagai sistem dalam kehidupan yang menyeluruh menawarkan solusi ekonomi secara komprehensif terhadap berbagai persoalan, termasuk kemiskinan. Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

كِي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian..." (TQS. Al-Hasyr [59]: 7). Ayat ini menegaskan prinsip penting dalam ekonomi Islam: kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir elite, melainkan harus didistribusikan secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Islam menekankan keadilan dalam kepemilikan, distribusi, dan pengelolaan kekayaan, serta menetapkan peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui instrumen-instrumen seperti zakat, kharaj, jizyah, dan pengelolaan kepemilikan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi dan implementasi solusi Islam dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan teori ekonomi Islam dari Taqiyuddin an-Nabhani sebagai kerangka utama, penelitian ini menawarkan alternatif sistemik terhadap paradigma ekonomi kapitalis yang telah mendominasi. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan ekonomi berbasis syariah yang adil dan berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis teks terhadap karya Sistem Ekonomi Islam oleh Taqiyuddin an-Nabhani serta dokumen-dokumen terkait kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, dilakukan wawancara semi-struktural dengan akademisi dan praktisi ekonomi Islam untuk mendapatkan perspektif aplikatif. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis guna memahami relevansi konsep ekonomi Islam terhadap realitas kemiskinan di Indonesia. Penelitian menelaah instrumen ekonomi Islam seperti zakat, kharaj, jizyah, larangan kepemilikan umum oleh individu, serta peran negara dalam distribusi kekayaan sebagaimana dijelaskan oleh an-Nabhani.

HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan bantuan sosial, tetapi memerlukan perubahan sistemik pada struktur ekonomi dan distribusi kepemilikan. Berdasarkan analisis terhadap karya Sistem Ekonomi Islam oleh Taqiyuddin an-Nabhani dan data lapangan melalui wawancara serta dokumen kebijakan terkait, penelitian ini menemukan bahwa akar permasalahan kemiskinan di Indonesia tidak terletak pada kurangnya sumber daya atau lemahnya program bantuan, melainkan pada struktur sistem ekonomi yang tidak berpihak kepada keadilan distribusi. Sistem kapitalis telah mempersempit akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang seharusnya menjadi milik umum. Privatisasi sumber daya vital seperti energi, air, dan tambang telah mengakibatkan akumulasi kekayaan pada segelintir elit ekonomi, sementara masyarakat luas terpinggirkan.

Dalam pandangan ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan oleh an-Nabhani, kepemilikan umum atas sumber daya strategis wajib dikelola negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Islam melarang individu atau korporasi menguasai kepemilikan umum. Konsep ini menjadi kunci dalam menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan menciptakan distribusi kekayaan yang merata. Negara Islam (Khilafah) dalam sistem an-Nabhani memiliki kewajiban untuk mengelola dan mendistribusikan kekayaan secara adil, serta menjamin kebutuhan pokok setiap individu: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Instrumen zakat, kharaj, dan jizyah bukan sekadar instrumen spiritual, tetapi merupakan mekanisme fiskal yang strategis dalam redistribusi kekayaan. Zakat, misalnya, diarahkan secara spesifik kepada delapan golongan mustahik yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Penyalurannya tidak berbasis belas kasihan, melainkan kewajiban negara dalam memberdayakan masyarakat miskin agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Begitu pula kharaj yang diambil dari hasil tanah pertanian non-muslim yang berada di wilayah Islam, digunakan untuk membiayai kebutuhan publik dan memperkuat ketahanan fiskal negara tanpa mengandalkan utang luar negeri.

Negara dalam Islam memiliki tanggung jawab membuka lapangan kerja, menyediakan pendidikan dan pelatihan keterampilan, memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak atas penghidupan yang layak. Fungsi negara bukan hanya sebagai regulator, seperti dalam kapitalisme, tetapi juga sebagai pelaksana langsung penyedia pelayanan publik. Wawancara dengan akademisi dan praktisi ekonomi Islam menggarisbawahi pentingnya pergeseran paradigma ekonomi dari orientasi pertumbuhan menuju orientasi keadilan. Mereka menilai kebijakan ekonomi saat ini masih fokus pada indikator makro, seperti: PDB dan investasi asing, sementara ketimpangan dan kemiskinan struktural dibiarkan berlarut-larut. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dinilai relevan dan aplikatif di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, asalkan didukung dengan komitmen politik yang kuat dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya perubahan sistemik.

Contoh empiris terlihat di beberapa wilayah yang menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam skala mikro, seperti pengelolaan zakat dan wakaf produktif. Beberapa lembaga amil zakat di Indonesia telah berhasil mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dan wakaf yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Meski belum menyentuh tataran sistemik nasional, contoh-contoh ini membuktikan potensi besar ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan secara riil. Dengan demikian, solusi Islam terhadap kemiskinan bukan sekadar teori, tetapi dapat diimplementasikan secara bertahap mulai dari aspek kebijakan fiskal, pengelolaan kepemilikan umum, hingga transformasi peran negara. Namun, agar sistem ini dapat berjalan optimal, diperlukan perubahan menyeluruh terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku, menuju sistem Islam yang menyeluruh sebagaimana digambarkan oleh an-Nabhani dalam model Khilafah.

Sistem ekonomi Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Taqiyuddin an-Nabhani, menawarkan solusi yang bersifat sistemik dan ideologis terhadap masalah kemiskinan. Solusi tersebut mencakup penataan ulang konsep kepemilikan (individual, umum, dan negara), pengelolaan sumber daya alam oleh negara untuk kepentingan rakyat, serta penggunaan instrumen-instrumen fiskal Islam seperti zakat, kharaj, dan jizyah untuk redistribusi kekayaan (Nabhani, 1990). Negara memiliki peran sentral dalam menjamin kebutuhan pokok rakyat, membuka akses terhadap lapangan kerja, dan memastikan distribusi pendapatan yang berkeadilan. Implementasi sistem ini membutuhkan perubahan menyeluruh terhadap sistem ekonomi, hukum, dan pemerintahan, yaitu menuju sistem Islam yang integral sebagaimana diwujudkan dalam institusi Khilafah. Dalam sistem ini, negara bukan hanya bertugas sebagai regulator pasar, tetapi juga sebagai penjamin kesejahteraan rakyat secara langsung. Prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan ekonomi membentuk tatanan yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya menghapus kemiskinan, tetapi juga mencegahnya muncul kembali secara struktural (Amhar & As, 1992; Antony & Laxmaiah, 2008; Arimah, 2004; Beik, 2016; Chaskin, 2019; Israil, 2011; Kadji, 2004; Khoir, 2010; Utomo, 2023; Wright et al., 2020).

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk landasan ideologis dan praktis bagi pengembangan kebijakan ekonomi alternatif yang bersumber dari Islam. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai keimanan. Oleh karena itu, rekomendasi dari studi ini adalah perlunya langkah-langkah konkrit untuk mendorong transformasi sistemik dalam pengelolaan ekonomi, melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pendidikan ekonomi Islam, dan penguatan kebijakan publik berbasis syariah (Agostino et al., 2020; Braams et al., 2021; Mahyudi, 2013; Oran, 2010; Pepinsky et al., 2018; Utomo, 2017).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, seperti yang diuraikan oleh an-Nabhani, berpotensi besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia secara adil dan berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan landasan ideologis dan praktis untuk perumusan kebijakan ekonomi berbasis syariah sebagai alternatif dari sistem kapitalisme yang dominan saat ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemiskinan yang terjadi secara sistemik di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan karitatif atau program bantuan sosial semata. Akar dari persoalan kemiskinan terletak pada struktur ekonomi kapitalistik yang tidak menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata. Sistem ini telah menyebabkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu, sementara kelompok masyarakat lainnya mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang esensial. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, seperti yang diuraikan oleh an-Nabhani, berpotensi besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostino, D., Arnaboldi, M., & Lema, M. D. (2020). New development: COVID-19 as an accelerator of digital transformation in public service delivery. *Public Money and Management*, 1–4. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1764206>
- Amhar, F., & As, S. (1992). *Kehancuran Peradaban Kapitalisme*.
- Antony, G. M., & Laxmaiah, A. (2008). Human development, poverty, health & nutrition situation in India. *Indian Journal of Medical Research*, 128(2), 198–205.
- Arimah, B. (2004). Poverty Reduction and Human Development in Africa. *Journal of Human Development*, 5(3), 399–415. <https://doi.org/10.1080/1464988042000277260>
- Beik, I. S. (2016). Islamisasi Ilmu Ekonomi. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 183–204.
- Braams, R. B., Wesseling, J. H., Meijer, A. J., & Hekkert, M. P. (2021). Legitimizing transformative government: Aligning essential government tasks from transition literature with normative arguments about legitimacy from Public Administration traditions. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 39(April), 191–205.

<https://doi.org/10.1016/j.eist.2021.04.004>

- Chaskin, R. J. (2019). Poverty policy, the market, and the metropolis. *Social Service Review*, 93(2), 340–356. <https://doi.org/10.1086/703107>
- Hamid, E. S. (2009). Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia. *La_Riba*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art1>
- Israil, S. (2011). KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 12(April), 91–98.
- Kadji, Y. (2004). *Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya*.
- Khoir, M. (2010). Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, 7(12), 15–26.
- Laster Pirtle, W. N. (2020). Racial Capitalism: A Fundamental Cause of Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic Inequities in the United States. *Health Education and Behavior*, 47(4), 504–508. <https://doi.org/10.1177/1090198120922942>
- Loewen, B. (2022). Revitalizing varieties of capitalism for sustainability transitions research: Review, critique and way forward. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 162(April), 112432. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112432>
- Mahyudi, M. (2013). Reviving the Islamic Economic System Through Shariah-Based Public Policy. *Humanomics*, 29(2), 80–87.
- Malkawi, M. (2020). *Fall of Capitalism and Rise of Islam*. <https://www.researchgate.net/publication/283422687>
- Nabhani, I. T. A. (1990). *Sistem ekonomi islam (An Nizham Al Iqtishadiy Fil Islam)*.
- Oran, A. F. (2010). An Islamic Socio-Economic Public Interest theory of Market Regulation. *Review of Islamic Economics*, 14(1), 125–146.
- Pepinsky, T. B., William Liddle, R., & Mujani, S. (2018). Piety and public opinion: Understanding indonesian islam. *Piety and Public Opinion: Understanding Indonesian Islam*, 7(1), 1–194. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190697808.001.0001>
- Spash, C. L. (2022). Conservation in conflict: Corporations, capitalism and sustainable development. *Biological Conservation*, 269(November 2021), 109528. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109528>
- Utomo, Y. T. (2017). Succes Story of Islamic Public Finance: Historical Perspective. *AT-TAUZI : Jurnal Ekonomi Islam*, 156–171. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/24>
- Utomo, Y. T. (2023). Breaking the Vicious Cycle of Poverty. *Tsarwatica*, 05(1), 1–6.

<https://doi.org/10.35310>

Wright, A. L., Sonin, K., Driscoll, J., & Wilson, J. (2020). Poverty and economic dislocation reduce compliance with COVID-19 shelter-in-place protocols. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 180, 544–554.

<https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.10.008>